ISSN. 2502-7832

SEMNAS
FISIP-UMPO

PROSIDING

SEMINAR NASIONAL 2016

"EVALUASI PILKADA SERENTAK:
MEMBANGUN KESADARAN POLITIK DAN
KOMUNIKASI PARTISIPATORIS
MENUJU PENGUATAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN"

SABTU, 9 APRIL 2016 - UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PONOROGO
Jl. Budi Utomo 10 Ponorogo Jawa Timur Indonesia 63471 Telp (0352) 481124 Fax (0352) 462796

ISSN. 2502-7832

Prosiding
SEMINAR NASIONAL & CALL PAPERS 2016

"Evaluasi Pilkada Serentak : Membangun Kesadaran Politik Dan Komunikasi Partisipatoris Menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan"

Penyunting

1. Dr. Nurul Imam
2. Dr. Bambang Widiyahseno
3. Drs. Jusuf Harsono
4. Dra. Ekapti Wahjuni Dj, M.Si
5. Dra. Niken Lestarini, M.Si
6. Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos, M.AP
7. Robby Darwis Nanution, S.IP, M.A
8. Yusuf Adam Hilman, S.IP, M.Si

Penerbit

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Ponorogo - Jawa Timur – Indonesia

Alamat

Jl. Budi Utomo No. 10, Ponorogo – Jawa Timur – Indonesia
http://semnas.fisip.umpo.ac.id/

DINAMIKA POLITIK LOKAL

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Pesta demokrasi, merupakan agenda tahunan yang diselenggarakan oleh pemerintah, untuk memilih pemimpin, selain membutuhkan persiapan yang panjang, biaya politik yang harus dikeluarkan sangatlah banyak, oleh karena itu diperlukan sebuah upaya yang berkesinambungan supaya output yang dihasilkan benar – benar sebagai hasil representatif yang diinginkan oleh rakyat. Mengaca dari pengalaman yang telah lalu, proses pilkada seringkali berjalan tidak maksimal, selain banyak diwarnai praktik – praktik kecurangan, seperti: 1). *Money Politic* atau politik transaksional, 2). *Black Campaign* (Kampanye hitam), dan berbagai jenis kecurangan lainnya, pada akhirnya menjadikan pesta demokrasi yang diselenggarakan hanya menyisakan sistem demokrasi yang sifatnya normatif atau prosedural, makna atau nilai subtantif yang seharusnya dicapai menjadi hilang ataupun kabur, karena praktek kecurangan.

Pilkada serentak, yang telah diwacanakan sejak lama, akhirnya dapat juga diselenggarakan pada tanggal 09 Desember 2015, walaupun pada awalnya, banyak sekali menuai kontroversi di kalangan masyarakat, praktisi, maupun para akademisi, namun demikian jika kita kaji lebih mendalam, gagasan pilkada serentak lahir karena beberapa alasan, diantaranya: 1). Mengingat besarnya biaya politik yang dikeluarkan pemerintah setiap kali pilkada, mengakibatkan biaya politik menjadi membengkak, dan anggaran negara akhirnya lebih banyak yang terserap untuk proses politik tersebut, seharusnya anggaran negara lebih diprioritaskan untuk pembangunan, 2). Dalam proses penyusunan rencana pembangunan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan, terkadang sulit mensinergikan komitmen antara pemerintah pusat dan daerah, karena adanya permasalahan – permasalahan teknis, terkait kekosongan pimpinan yang ada di daerah, karena adanya perbedaan waktu pemilihan di beberapa daerah, sehingga proses tersebut menjadi penghambat dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah di suatu daerah dengan daerah lain, yang menyebabkan adanya pencapaian progresnya berbeda. 3). Proses pilkada yang selama ini telah dilakukan, terkadang membuat masyarakat menjadi kehilangan fokus akibat penyelenggaraan pilkada yang tidak kunjung usai, karena adanya gugatan pasca pilkada, kemudian adanya pemilihan di tingkat provinsi maupun agenda politik lain, yang jaraknya terlalu lama, sehingga masyarakat kehilangan semangat untuk menyongsong pesta demokrasi, jika dilakukan secara serentak masyarakat bisa lebih fokus untuk memilih para pemimpin daerah.

Pelaksanaan pilkada serentak, yang telah selesai diselenggarakan, tentunya banyak memberikan catatan – catatan penting, terkait dengan persoalan – persoalan ataupun kendala teknis dalam pelaksanaan proses demokrasi tersebut, oleh karena itu maka penting bagi kita untuk melakukan evaluasi, supaya proses pilkada yang sudah dijalankan bisa dilihat kekuranganya untuk menjadi bahan perbaikan pada pilkada yang akan datang, guna meminimalisir kesalahan, kekeliruan serta ketidakefektifan dalam penyelenggaraan pilkada tersebut, pemerintah telah membentuk Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU), lembaga ini dibentuk dengan tujuan untuk melakukan pengawasan dan pengawalan pelaksanaan pemilu dari awal hingga akhir, supaya penyelenggaraan pemilu dapat berjalan dengan baik dan jujur.

Keberadaan BAWASLU sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap jalannya pemilihan kepala daerah, tidak lantas masyarakat bisa berpangku tangan, tetap diperlukan pengawasan dari masyarakat, jika bisa ada sinergitas antara bawaslu dengan

masyarakat, untuk sama – sama menjaga, mengawasi jalannya pilkada serentak supaya bisa berjalan dengan baik. Proses panjang dalam pelaksanaan pilkada serentak, pada tataran praktisnya, melibatkan beberapa pihak, baik secara langsung maupun tidak, diantaranya: pemerintah melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik dan kandidat calon kepala daerah, dan juga masyarakat sebagai aktor utama dalam seremonial pesta demokrasi.

Setiap pihak memiliki sudut pandang yang dapat kita potret dalam proses tersebut. *Pertama*, dari sudut pandang penyelenggara pemilihan umum atau Komisi Pemilihan Umum (KPU), lembaga ini merupakan salah satu komponen penting dalam proses demokrasi, *dibentuk mulai dari tataran pusat, tataran daerah tingkat I yaitu Proviasi, hingga tinggkat II* yaitu Kabupaten dan Kota. Lembaga ini menjalankan tugas penyelenggaraan pemilu dengan menekankan asas, jujur, bebas, rahasia, adil, tugasnya menyelenggarakan pemilu supaya dapat berjalan dengan baik. *Kedua,* Partai Politik, merupakan kontestan yang akan mengusulkan calon kepada masyarakat, melalui berbagai pendekatan dan media komunikasi politik, seperti: video, pamflet, baliho, kaos, seminar dan lain sebagainya. *Ketiga*, dari sudut pandang masyarakat, dimana masyarakat sebagai pemilih dituntut untuk memiliki kesadaran dan mampu berparrtisipasi secara aktif, untuk mengontrol dan menentukan pilihan, berdasarkan pertimbangan dan juga *perform* dari masing – masing bakal calon kepala daerah. Penekanan ditujukan kepada masyarakat, supaya memiliki kesadaran dan harus secara aktif melakukan kontrol terhadap berbagai bentuk kecurangan dalam proses tersebut, yang bisa mempengaruhi hasil akhir dalam proses demokrasi. Dalam proses demokrasi, terkait penyelenggaran pilkada jika bisa berjalan dengan baik, tanpa diwarnai dengan proses transaksional, maka hasil atau output yang akan diperoleh, bisa berimpilikasi terhadap kepemimpinan kepala daerah, yang benar – benar kredibel, sehingga kepala daerah yang terpilih akan mampu menjalankan dan tata kelola pemerintah dengan baik (*good Governance*), oleh karena itu proses evaluasi hasil pilkada, menjadi sangat penting, guna memberikan spirit demokrasi yang benar – benar jujur, adil, dan langsung umum dan rahasia, dengan mengedepankan proses yang domokratis, yakni: *dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat.*

Berdasarkan fenomena tersebut diatas, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Ponorogo, berinisiatif untuk melakukan sebuah kajian, terkait evaluasi proses pelaksanaan pilkada serentak tahun 2015 yang bertujuan agar pelaksanaan pilkada bisa memenuhi ekspektasi bersama yaitu: terselenggara dengan baik, transparan dan juga bisa melahirkan para pemimpin yang dapat bertanggungjawab, memiliki kompetensi, sehingga nanti ketika memimpin sebuah daerah bisa benar – benar memahami keinginan dan kebutuhan masyarakatnya, dan tidak terpaku pada politik transaksional yang menyesatkan. Dengan demikian, maka SEMNAS FISIP UNMUH Ponorogo 2016 mengangkat tema: "***Evaluasi Pilkada Serentak: Membangun Kesadaran Politik dan Komunikasi Partisipatoris menuju Penguatan Tata Kelola Pemerintahan***"

BillahifisabilhaqFastabikulkhoirot

Wassalamua'alaikum Wr. Wb.

Ponorogo, 09 April 2016

Dekan,

Dra. Hj. Niken Lestarini, M.Si

SUSUNAN PANITIA

Penanggungjawab	:	Dra. Hj. Niken Lestarini, M. Si
Ketua	:	Dian Suluh Kusuma Dewi, S.Sos, M.AP
Sekertaris	:	Yusuf Adam Hilman
Bendahara	:	Dra. Ekapti Wahjuni Dj. M. Si
Seksi Acara	:	Ayub Dwio Anggara, S.I.Kom, M. Si
Seksi Prosiding	:	Dr. Bambang Widiyahseno, M.Si Drs. Jusuf Harsono, M.Si Robby Darwis Nasution, S.IP, M.A
Seksi Humas	:	Eli Purwati, S.Sos Khoirrurosyidin, S.IP, M.Si Irvan Nuridho, S.AP Arif Rahman Yusuf, S.Pd, M.Pd
Dekorasi & Dokumentasi	:	Oki Cahyo Nugroho, S. Sn Deni Wahyu Tricana, S.Sos
Konsumsi	:	Dwiana Binti Yulianti, S.Pd, M.Pd Rohfin Andria Gestanti, S.Pd, M.Pd
Perlengkapan	:	Drs. Bambang Triono Drs. Pinaryo, mm Agus Susanto

PANDUAN PENULISAN ARTIKEL

Call for Papers

SEMINAR NASIONAL FISIP UNIVERSITAS MUHAMAMDIYAH PONOROGO TAHUN 2016

JUDUL

Sub Tema

Nama Penulis

Alamat Lembaga

Email Penulis

ABSTRAK

Abstrak harus ditulis dalam satu paragraf, antara 150-250 kata. Kata "Abstrak" ditulis dengan Arial, Ukuran 10, spasi satu, rata tengah kanan kiri (justified). Abstrak diikuti dengan empat hingga enam kata kunci (ditulis dengan arial, ukuran 10 italic rata kiri).

Kata kunci : Inovasi, birokrasi, reformasi birokrasi, pemberdayaan

1. **Ketentuan Umum**

   Makalah merupakan hasil penelitian ataupun kajian pustaka yang bisa ditulis oleh perorangan ataupun kelompok. Makalah ditulis di **Microsoft Word** dengan ukuran kertas **A4 (8.27" x 11.29").** Huruf yang digunakan adalah **Arial, Ukuran 11, spasi 1,5,** reguler, rata kanan kiri (justified). Paragraf dimulai dengan indentation (menjorok kedalam) 1cm. Antar Paragraf tidak perlu dipisah dengan spasi kosong. Jumlah halaman berkisar antara 10-15 halaman untuk setiap artikel (sudah termasuk daftar pustaka). Kirimkan artikel dalam bentuk file : rtf. Beri nama file dengan cara : **nama penulis_sub tema** (contoh: kardiman sujatmiko_sub tema).

2. **Format tulisan**

a. **Margin**

Margin atas, bawah, kanan dan kiri adalah 2,5cm

b. **Headings**

Heading hanya dapat dibuat dua tingkat dimana heading pertama (sub judul), ditulis dengan Arial ukuran 12, Bold, rata kiri dengan huruf capital hanya di kata pertama. Sub judul didahului dan diikuti satu spasi kosong. Heading kedua (sub-sub judul) ditulis dengan Arial ukuran 11, *bold*, rata kiri, dengan huruf capital hanya di kata perama, didahului dan diikuti satu spasi kosong.

c. **Nomor Halaman**

Penomoran halaman ditulis di tengah bawah (*bottom of page plain nomer 2*)

d. **Figur dan Tabel**

Semua figure dan tabel harus diberi nomor dan judul. Figur, tabel, nomor dan judul diletakkan rata tengah *(centered)*. Nomor figure dan tabel diurutkan, dimulai dari angka 1.

Nomor dan judul figure diletakkan di bawah figure dan ditulis dengan Arial, ukuran 9, regular, spasi tunggal.

Nomor dan judul tabel diletakkan di atas tabel, arial, ukuran 9, regular, spasi tunggal. Figur dan tabel ditempatkan diantara bagian teks yang paling banyak membahasnya.

3. **Layout**

a. **Judul**

Judul ditulis dengan huruf CAPITAL, dicetak tebal. Arial, ukuran 14, rata tengah (centered). Didahului tiga spasi dan diikuti dua baris spasi.

b. **Nama Penulis**

Nama penulis ditulis lengkap, Arial, ukuran 10, rata tengah (centered), *italic*. Jika penulis lebih dari satu, diurutkan dari penulis pertama dan seterusnya.

c. **Referensi**

Referensi ditulis dengan **APA style.** Daftar pustaka ditulis dengan huruf Arial ukuran 9, spasi tunggal, rata kanan kiri (*justified*), regular, diurutkan secara alphabet.

Semua sumber kutipan yang terdapat dalam teks harus dimasukkan ke dalam daftar pustaka. Sebaliknya, tidak diperbolehkan mencantumkan pustaka yang tidak dikutip di dalam teks dalam daftar pustaka. Di dalam makalah, rujukan pada referensi ditulis dengan footnote sesuai ketentuan **APA. (Bodynote dilarang digunakan)**

4. Isi naskah

Naskah terdiri dari:

a. Pendahuluan
b. Tinjauan Pustaka
c. Metodologi
d. Hasil dan Pembahasan
e. Kesimpulan dan Saran

Contoh catatan kaki :

[1] Robert Jackson and George Sorensen. 2009. Introsuction to International Relations. Oxford University Press. New York (versi terjemahan Pengantar Studi Hubungan Internasional. Pustaka Pelajar. Yogyakarta). Hal. 23

[2] Bambang Haedar Asykuri, dkk. 2003. Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah LP3 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Yogyakarta. Hal. 45

[3] Miriam Budiardjo. 2012. Dasar-Dasar Ilmu Politik. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 167

[4] Firdaus Syam. 2010. Pemikiran Politik Barat; Sejarah, Filsafat, Ideologi, dan Pengaruhnya Terhadap Dunia Ke-3. PT. Bumi Aksara. Jakarta. Hal. 90

Ibid.Hal 100

Op. Cit. Miriam. Hal. 190

Contoh Daftar Pustaka :

Wirawan, I.B.. 2012. Teori-Teori Sosial dalam Tiga Paradigma (Fakta Sosial, Definisi Sosial, dan Perilaku Sosial). Kencana Prenada Media Group. Jakarta.

Rodee, Carlton Clymer, dkk. 2013. Pengantar Ilmu Politik. PT. Rajagrafindo Persada. Jakarta.

Mufti, Muslim. 2013. Teori-Teori Politik. CV. Pustaka Setia. Bandung

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UNMUH Ponorogo i

Daftar Isi vii

A. KOMUNIKASI DAN KEARIFAN LOKAL

EVALUASI PILKADA SERENTAK: PROBLEMATIKA DARI TRANSISI KE KONSOLIDASI

Gun Gun Heryanto 1

PROBLEMATIKA KONSELOR SEBAYA DALAM MENGATASI PERMASALAHAN KONSELING (STUDI KASUS KONSELING SEBAYA DI UNIVERSITY RESIDENCE UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH YOGYAKARTA)

Rila Setyaningsih 15

POLITISASI ADAT HIBUA LAMO: PRODUK POLITIK CALON INDEPENDEN DALAM PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH MALUKU UTARA

Frets Alfret Goraph 33

PERAN ELIT LOKAL DALAM KEMENANGAN PARTAI GERINDRA PADA PEMILIHAN UMUM LEGISLATIF TAHUN 2014 DI KABUPATEN LUWU UTARA

Iqbal Aidar Idrus , Titin Purwaningsih 49

POLITIK INFORMAL DALAM PEMILUKADA 2015 DI BANGKA SELATAN

David Efendi, Agam Primadi 66

PERAN KOMUNITAS BELAJAR SABALAD DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PANGANDARAN

Kiki Endah, Endah Vestikowati 96

EFEKTIFITAS *MARKETING* DAN *BRANDING POLITICS* PARA KANDIDAT KEPALA DAERAH PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Neng Suryanti Nengsih, Rendra Setyadiharja, Sharil Budiman, Suherry, Raja Dachroni 113

PILKADA SEBAGAI PEMBENTUKAN POLITIK KEKERABATAN

Muhtar Haboddin 133

THE TRANSFORMATION OF CIVIC ENGAGEMENT : INDONESIAN YOUTH PARTICIPATION

Mirza Hardian 147

KEMENANGAN PARTAI ACEH PADA PEMILUKADA GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR ACEH 2012 (Studi Tentang Perilaku Pemilih di Kabupaten Aceh Selatan)

Mukhrijal, Titin Purwaningsih 163

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PARTISIPASI POLITIK MASYARAKAT ETNIS TIONGHOA DIKELURAHAN TANJUNGPINANG KOTA DALAM PEMILIHAN GUBERNUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2015 KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

Nur. A. Dwi Putri, Imam Yudhi Prastya 182

PARTISIPASI POLITIK SEMU DALAM PILKADA PONOROGO TAHUN 2016

Jusuf Harsono 197

IMPLEMENTASI EMPAT PILAR KEBANGSAAN DALAM BERPOLITIK

Anip Dwi Saputro 205

PELESTARIAN BUDAYA LOKAL DALAM *MANUNGGALING FIKIRAN LAN ATI ING DALEM SHOLAWAT* (MAFIA SHOLAWAT) STUDY FENOMENOLOGI PADA KELOMPOK MAFIA SHOLAWAT DI KABUPATEN PONOROGO

Dian Suluh Kusuma Dewi, Lilik Suntari 219

KEARIFAN LOKAL KERAJAAN GALUH DALAM MEMBENTUK BUDAYA POLITIK DI KABUPATEN CIAMIS

Dini Yuliani, R. Rindu Garvera 228

B. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA

KAJIAN KRITIS TERHADAP PEMETAAN HASIL EVALUASI PILKADA

Yusuf Adam Hilman 239

PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEBAGAI PENYALUR ASPIRASI MASYARAKAT

Khoirurrosyidin 251

PENDAMPINGAN PROGRAM JALIN MATRA FEMINISASI KEMISKINAN PROVINSI JAWA TIMUR DI DESA BANDUNGAN, NGLANDUK, BODAG, SEGULUNG DI KABUPATEN MADIUN TAHUN 2015

Nanang Cendriono 260

PENATAAN DAN PEMBINAAN PEDAGANG KAKI LIMA DALAM PERSPEKTIF KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DI SURAKARTA (2005-2012)

Muhamad Fajar Pramono 282

UPAYA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA MELAKUKAN PENGENDALIAN PENDUDUK UNTUK INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM) DI KABUPATEN PONOROGO

Bambang Widiyahseno 292

PENDIDIKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA KOMUNITAS SWALAYAN SURYA DI KECAMATAN PULUNG SEBELUM DAN SESUDAH PILKADA SERENTAK

Imam Mahfud 307

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA TAHUN 2015

(STUDI DI DESA BUDUGSIDOREJO KECAMATAN SUMOBITO KABUPATEN JOMBANG)

Andi Setiawan, Nila Febri Wilujeng 318

PELAYANAN PUBLIK DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI DESA HAMPARAN PERAK

Siti Hajar 330

EFEKTIVITAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DALAM PENGEMBANGAN POTENSI EKONOMI BERBASIS PARTISIPASI MASRARAKAT (Studi Kasus : Desa Bangunjiwo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta)

Helen Dian Fridayani, Aulia Nur Kasiwi, Mardha Adhi Pratama 337

RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN PEMERINTAH DESA SUB TEMA : TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Arif Zainudin, Unggul Sugiharto 353

MERAYAKAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES)

Irma Fitriana Ulfah 370

STUDI IMPLEMENTASI AZAS TUGAS PEMBANTUAN DAN AZAS PENUGASAN DALAM PENGUATAN DESA DI KABUPATEN BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT

Fernandes Simangunsong 384

UPAYA PUBLIC RELATIONS MELALUI PROGRAM CSR DALAM MENGHADAPI DINAMIKA SOSIAL - POLITIK DI MASYARAKAT 401

Yugih Setyanto, Paula T. Anggarina .....

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI WISATA APUNG KAMPOENG RAWA KECAMATAN AMBARAWA KABUPATEN SEMARANG 409

Agus Triyono, Muhammad Ali Masyhar .....

C. KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU

PROSES KEBIJAKAN PUBLIK, ANALISA KEBIJAKAN PUBLIK, POLITIK KEBIJAKAN PUBLIK, MAKNA DAN KARAKTERISTIK KEBIJAKAN PUBLIK

Mohammad Ridwan 421

POLITIK PAPAN CATUR

Persoalan Kandidasi Partai Aceh Menjelang Pemilihan Gubernur Serentak 2017 430

Vellayati Hajad, Ikhsan .....

EKSISTENSI PERAN HUMAS (PUBLIC RELATIONS) PERGURUAN TINGGI SWASTA DALAM MENGHADAPI MASYARAKAT EKONOMI ASEAN (MEA)

Veri Setiawan 440

KONSISTENSI ANTARA PROGRAM PARTAI DENGAN PRODUK KEBIJAKAN PUBLIK DI KABUPATEN BANDUNG (2011-2015) 452

Dede Sri Kartini .....

DISKURSUS MEME DALAM EPISTEMOLOGI KOMUNIKASI POLITIK MASYARAKAT DIGITAL 470

Anang Hermawan .....

KOMUNIKASI POLITIK DAN PENANDA ZAMAN

(Studi *Branding* Kampanye Politik Indonesia)

Gregorius Genep Sukendro 483

KOMUNIKASI VERBAL DAN NONVERBAL DALAM RITUAL WISUDA WAROK PONOROGO: SUATU KAJIAN ETNOLINGUISTIK

Alip Sugianto 505

INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN DAERAH: TWITTER UNTUK KOMUNIKASI PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI KOTA SEMARANG

Dzunuwanus Ghulam Manar 517

PENGEMBANGAN MODEL KOMUNIKASI POLITIK GUNA MENCEGAH TERJADINYA KONFLIK ANARKIS DALAM PILKADA

Ratna Setyarahajoe 537

KOMODIFIKASI *KOREAN WAVE* MELALUI MEDIA DAN IMPLIKASINYA PADA GAYA HIDUP REMAJA INDONESIA

Lusia Savitri Setyo Utami 560

PEMANFAATAN KARIKATUR SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI POLITIK

Sigit Dwi Laksana 572

KOMUNIKASI POLITIK BASUKI TJAHAJA PURNAMA (AHOK) SEBAGAI GUBERNUR DKI JAKARTA DALAM PERSPEKTIF SOSIOKULTURAL

H.H. Daniel Tamburian 583

IMPLEMENTASI DIGITAL PUBLIC RELATIONS (PR)

(Studi Kasus : Humas Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mensosialisasikan Tagline "Jogya Istimewa")

Adhianty Nurjanah, Friski Yulianti Nurnisya 595

PENGARUH PELAYANAN, FASILITAS DAN HARGA TERHADAP KETERTARIKAN PELANGGAN PADA CV. DOOR SMEER KINCLONG MEDAN

Abdul Haris 613

D. MEDIA, INDUSTRI PROGRAM DAN JURNALISTIK

KOMUNIKASI PEMBANGUNAN DAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DI DESA PALUH MANAN

Irwan Syari Tanjung 643

SURAT KABAR DAN KONVERGENSI MEDIA (STUDI KASUS DI SURAT KABAR HARIAN SOLOPOS)

Anton Wahyu Prihartono 652

CERMIN RETAK DEMOKRASI: PERS DAN JURNALISME POLITIK "TANPA ISI"

Hakim Syah 668

PENGARUH KONSUMSI MEDIA DAN INTERAKSI *PEERGROUP* TERHADAP PERILAKU PEMILIH PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK 2015 DI JAWA TENGAH

Fitri Norhabiba 684

PERAN MEDIA DALAM DUNIA DAKWAH

Sutanto 695

CITRA NARSIS CAPRES 2014 DI MEDIA MASSA

Muhammad Fadeli, Hadi Sutrisno 704

HUBUNGAN MEDIA PENENTU SUARA DALAM KAMPANYE POLITIK

Nurudin 724

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI MEDIA KOMUNIKASI MEMBANGUN PERADABAN UNGGUL

Rido Kurnianto 741

ANALISA MELEK POLITIK WARGA PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014

Studi Kasus: Desa Jerukwudel dan Desa Karangawen Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunungkidul DIY

Rosalia Widhiastuti Sri Lestari 750

MAKNA SELFIE DALAM MEMBENTUK KARAKTERISTIK, CITRA, DAN IDENTITAS DIRI PADA IBU RUMAH TANGGA

Dwi Kartikawati 778

PROSES KREATIF DESAIN SAMPUL BUKU DALAM MEMBANGUN *BRAND POSITIONING*

Zein Mufarrih Muktaf 791

DI MANA RAKYAT JAKARTA DI MEDIA?

(Kontruksi Sosial Warga Jakarta Jelang Pilgub DKI 2017 di Media Detik.com, Kompas.com dan Liputan6.com)

Farid Rusdi 810

DAMPAK MEDIA SOSIAL TERHADAP/ DALAM KOMUNIKASI POLITIK
(Studi Kasus: Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Kepulauan Riau)
Shahril Budiman, Azma Shafariani, Krisna 817

DESENTRALISASI PENDIDIKAN DI KOTA BANDUNG PROVINSI JAWA BARAT: STUDI TENTANG URUSAN PENDIDIKAN DASAR
Aos Kuswandi, Siti Nuraini 833

E. DINAMIKA PARTAI POLITIK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN AKIBAT *MALPRACTICE*
H. Ikhsan Yusda. PP 845

EFEKTIVITAS PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT BERBASIS *E-GOVERNMENT*

STUDI : PELAKSANAAN PELAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI UNIT PELAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN (UPIK) KOTA YOGYAKARTA
Gerry Katon Mahendra 861

POTENSI DAN TANTANGAN PILKADA SERENTAK 2015
Audra Jovani 879

DEMOKRASI LOKAL : DAMPAK PEMILIHAN KEPALA DAERAH LANGSUNGTERHADAP PERILAKU PEMILIH
Syafhendry 888

KAMPANYE DALAM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DIBIAYAI NEGARA KOMUNIKASI POLITIK, DEMOKRASI DAN PEMILU
Desna Aromatica 898

MUHAMMADIYAH DAN POLITIK (ANALISA PENGALAMAN POLITIK PADA PILPRES II PONOROGO TAHUN 2004)

Happy Susanto 908

EVALUASI SOSIALISASI PEMILIHAN PADA PILKADA SERENTAK TAHUN 2015 DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Bismar Ariyanto 918

HARMONI SUNGAI DAN MANUSIA DALAM TRADISI MERTI CODE POLITIK PELESTARIAN SUNGAI BERBASIS KEARIFAN LOKAL DI YOGYAKARTA

Suswanta 927

KEARIFAN LOKAL SEBAGAI BASIS KOMUNIKASI PEMERINTAH DALAM MENGATASI KONFLIK SOSIAL DAN KOMUNAL

Ansar Suherman 935

MERAYAKAN SEPAK BOLA, MERAWAT SEJARAH, MEMBERITAKAN KOTA BERSAMA BAWAH SKOR

Fajar Junaedi 945

ETIKA DAN TANGGUNG JAWAB KEPEMIMPINAN (STUDI HADITH-HADITH RASULULLAH TENTANG *AL-IMAM* DAN *AL-IMAMAH*)

Nurul Iman 960

GAYA KEPEMIMPINAN DALAM ORGANISASI: MEMBANGUN KOMUNIKASI ORGANISASI YANGEFEKTIFDI ERAMEA

Joko Sutarso 968

TRADISI "TORON" : BENTUK KOMUNIKASI KELUARGA DAN KEARIFAN LOKAL MADURA

Nikmah Suryandari 977

STUDI MODAL SOSIAL KELOMPOK PEREMPUAN PESISIR : UPAYA PENGENTASAN KEMISKINAN KELUARGA MASYARAKAT PESISIR

Andy Arya Maulana Wijaya 988

PERAYAAN GREBEG SURO SEBAGAI PENGEMBANGAN SEKTOR PARIWISATA PONOROGO
(ANALISIS POTENSI PENGEMBANGAN WISATA BUDAYA PONOROGO)

Ekapti Wahjuni Djuwitaningsih 1001

KOMPETENSI WARTAWAN MEDIA CETAK DALAM PERSFEKTIF ISLAM

Marlina 1014

F. BUDAYA BIROKRASI

KEKUASAAN CAPITAL : PERSOALAN RUANG PUBLIC (MEDIA) DAN KRISIS DEMOKRASI DI INDONESIA

Puji Rianto 1029

PENGARUH IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM KELAS TUNTAS BERKELANJUTAN (SKTB) TERHADAP KUALITAS ANAK DIDIK DI SDI PANGGENTUNGAN SELATAN KECAMATAN SOMBAOPU KABUPATEN GOWA

Nuryanti Mustari, Tahir Tuju 1040

PEREMPUAN DI BALIK POLITIK (ANALISIS TERHADAP KONSTRUKSI PERAN POLITIK PEREMPUAN SEBAGAI SUBJEK DAN PENDUKUNG POLITIK PADA PILKADA 2015)

Rhesa Zuhriya Briyan Pratiwi 1054

POPULARISME DAN PRAGMATISME TAK TERBENDUNG : SEBUAH REFLEKSI POLITIK TENTANG PEMILIHAN KEPALA DAERAH SERENTAK TAHUN 2015

Idil Akbar 1074

URGENSI PENDIDIKAN POLITIK DI ERA PILKADA LANGSUNG

Ayok Ariyanto 1090

PENATAAN GRAND DESIGN REFORMASI BIROKRASI (STUDI KASUS: PROGRAM PATEN DI KECAMATAN BINTAN TIMUR, KABUPATEN BINTAN)

Suherry, Nurul hafizah, Nurhadiyanti 1101

REFORMASI BIROKRASI
POLITISASI BIROKRASI PADA PILKADA DI KABUPATEN MALANG TAHUN 2015

Fathur Rahman 1115

AKSELERASI REFORMASI BIROKRASI KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Sakir, Dipi Mutiara, M. Eko Atmojo, Riska Sarofah 1127

TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN DAERAH DI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH (SKPD) KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2014

Firmanto Latief 1146

REFORMASI BIROKRASI BIDANG PROMOSI JABATAN STUDI: PELAKSANAAN PROMOSI JABATAN STRUKTURAL ESELON II DI PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Muhammad Eko Atmojo, Ady Muzwardi, Sakir 1161

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB MENURUNNYA KETERLIBATAN POLITIK APARATUR BIROKRASI PADA PEMILUKADA SERENTAK (STUDI KABUPATEN PANDEGLANG PROVINSI BANTEN)

Ombi Romli 1175

BUDAYA BIROKRASI DALAM PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BUTON

Anwar Sadat 1195

MENYEMBUNYIKAN POLITIK UANG DIBALIK PILKADA SERENTAK KABUPATEN PANDEGLANG BANTEN 1209

Elly Nurlia .....

*OPINION LEADER*DALAM KEHIDUPAN SOSIAL DAN POLITIK MASYARAKAT DESA DI INDONESIA 1220

Niken Lestsrini .....

PEMANFAATAN SUMBERDAYA ALAM SEKTOR PERIKANAN GUNA MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PESISIR DI PROVINSI KEPULAUAN RIAU

Rizky Nanda Hidayat, Rendra Setydiharja, Zamzami A. Karim, Junriana 1225

REKRUITMEN POLITIK PADA PEMILU LEGISLATIF TAHUN 2014 (STUDI REKRUITMEN CALON LEGISLATIF DAERAH PAN KABUPATEN PONOROGO) *1241*

Titin Sarwenda, Sulton .....

HARMONI SUNGAI DAN MANUSIA DALAM TRADISI MERTI CODE

Politik Pelestarian Sungai Berbasis Kearifan Lokal di Yogyakarta[50]

Suswanta
Prodi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

ABSTRAK

Tulisan ini bermaksud menjelaskan bagaimana konsep harmoni sungai dan manusia yang terkandung dalam tradisi Merti Code di Yogyakarta dan berbagai aksi pelestarian sungai Code yang dilakukan masyarakat. Harmoni sungai dan kehidupan manusia adalah kunci keberhasilan pelestarian sungai. Melalui konsep tersebut manusia akan menyadari arti penting keberadaan sungai bagi kehidupan. Buah dari kesadaran tersebut, manusia akan senantiasa menjaga, merawat dan melestarikan sungai. Merti Code adalah politik budaya untuk membangun sungai. Sebuah tradisi, yang bukan hanya sekedar seremoni dan hura-hura, tetapi juga konsep budaya berikut aksi nyata pelestarian sungai. Tradisi budaya yang tidak menempatkan masyarakat hanya sebagai obyek kesadaran, melainkan juga sebagai subyek yang ikut berperan dalam melestarikan sungai. Merti Code telah mengembangkan makna sungai tidak hanya dalam kalkulasi ekonomi semata, tetapi sebagai sumberdaya yang memberi kehidupan melalui proses sakralisasi. Dibalik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam mitos dan upacara adat yang dianggap sakral, terkandung nilai kearifan lokal yang berfungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pelestarian sungai. Sungai yang lestari terbukti mampu memberi manfaat ekologis yang besar bagi masyarakat. Merti Code dapat menjadi spirit berkembangnya paradigma baru dalam membangun kebijakan pelestarian sungai secara berkelanjutan.

Kata kunci : *Merti Code, Tradisi Budaya, Kearifan Lokal dan Pelestarian Sungai*

PENDAHULUAN

Tulisan ini bermaksud menjelaskan konsep harmoni sungai dan manusia dalam tradisi Merti Code serta berbagai aksi pelestarian sungai yang dilakukan oleh masyarakat sempadan sungai Code di Yogyakarta. Konsep harmoni sungai dan manusia adalah kunci keberhasilan pelestarian sungai. Sungai adalah alur atau wadah air alami dan/atau buatan berupa jaringan pengaliran air beserta air di dalamnya, mulai dari hulu sampai muara, dengan dibatasi kanan dan kiri oleh garis sempadan. Tanpa konsep harmoni dengan sungai, manusia tidak akan memahami dan menghargai sungai sebagai jalan air. Sungai justru dianggap sebagai tempat praktis dan strategis untuk membuang semua kotoran, baik berupa sampah maupun air limbah dari rumah tangga dan industri.

[50] Judul Makalah Semnas dan Call Paper di FisipUnmuh Ponorogo, Sabtu, 9 April 2016

Akibat tumpukan sampah, sungai mengalami sedimentasi dan aliran air menjadi terhalang sehingga berpotensi banjir di musim penghujan. Timbunan sampah yang membusuk di air akan mengeluarkan bau busuk. Genangan air sungai yang tidak mengalir akan menjadi sarang nyamuk. Air limbah yang mengandung bahan kimia menyebabkan pencemaran air sungai dan matinya ekosistem sungai. Flora dan fauna sungai menjadi rusak, hanya enceng gondok yang dapat tumbuh di air yang tercemar, namun keberadaannya justru memperparah kerusakan sungai. Kerusakan sungai akibat perilaku salah masyarakat pada akhirnya juga akan berakibat fatal kepada masyarakat itu sendiri.

Dengan demikian, dibutuhkan perubahan paradigma dalam memandang sungai. Sungai bukanlah wadah untuk membuang segala kotoran, akan tetapi sumberdaya yang dapat memberi kehidupan. Sungai yang kotor dan tidak sehat akan menurunkan kualitas lingkungan, sementara sungai yang bersih dan sehat akan meningkatkan kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat. Bertolak dari perspektif ini, tradisi Merti Code atau merawat sungai Code menjadi sangat relevan untuk dikaji. Merti Code adalah politik pelestarian sungai berbasis kearifan lokal masyarakat yang terbukti mampu membangun kesadaran masyarakat, khususnya sempadan sungai untuk merawat dan melestarikan sungai berkelanjutan. Kesadaran masyarakat sempadan sungai perkotaan yang tergerak untuk melestarikan sungai masih merupakan sesuatu yang sulit ditemui di Indonesia (Kementerian Pekerjaan Umum, 2005).

Kemunculan gerakan sosial atau gerakan penyelamatan lingkungan berbasis warga (*citizen centered*) di kawasan perkotaan dapat dilihat sebagai reaksi atau kritik dari kelompok masyarakat terhadap kelambanan institusi pemerintah dalam menyediakan atau memfasilitasi apa yang seharusnya menjadi kewajiban pemerintah sebagai pembuat kebijakan pengelolaan lingkungan. Di sisi lain, juga dapat menjadi peringatan (*warning*) bagi pemerintah dan stakeholders agar melakukan perubahan paradigma terkait dengan pengelolaan lingkungan kawasan perkotaan. Penanganan permasalahan lingkungan di kawasan perkotaan tidak akan efektif jika hanya ditangani oleh masyarakat saja. Penanganan tersebut juga harus melibatkan pemerintah kota. Pemerintah kota adalah pihak yang berwenang membuat kebijakan atau peraturan daerah dalam rangka penataan dan penanganan lingkungan.

Berikut ini akan dijelaskan relasi konsep *Hamemayu Hayuning Bawono* dengan tradisi Merti Code, konsep harmoni sungai dan manusia dalam tradisi Merti Code serta aksi pelestarian sungai yang dilakukan oleh masyarakat sempadan sungai Code.

RELASI KONSEP HAMEMAYU HAYUNING BAWONO DENGAN TRADISI MERTI CODE

Unsur-unsur budaya Jawa yang *intagible* yang masih terpelihara di Yogyakarta adalah nilai-nilai luhur (*value*) dan keyakinan-keyakinan (*beliefs*) yang digunakan sebagai pedoman perilaku atau adat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi. Nilai luhur sekaligus konsep filosofis Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) adalah *Hamemayu Hayuning Bawono.* Berkaitan dengan konsep filosofis DIY tersebut, Sri Sultan Hamengkubuwono (2009) menjelaskan bahwa :

> "Kata *hayu* berasal dari kata *rahayu* yang secara harafiah berarti selamat. Konsep tersebut sejalan dengan prinsip keselarasan dalam masyarakat Jawa. Dalam wacana masa kini, konsep tersebut secara universal diartikan sebagai nilai-nilai yang menjamin keselamatan alam semesta yang lestari dan berkelanjutan dalam satu kesatuan ekosistem yang bertumpu pada keputusan generasi sekarang, yang juga dibutuhkan untuk kemanfaatan generasi yang kemudian. Selanjutnya dijelaskan bahwa konsep rahayu hanya bisa dimaknai manakala kita melihat alam bukan sebagai obyek eksploitasi. Alam harus dipandang sebagai subyek, berdampingan dengan manusia sebagai subyek lainnya. Alam adalah tetangga kita, perilaku yang tidak bijak kepada tetangga, akhirnya juga akan berdampak balik yang merugikan kita sendiri juga.

Secara harfiah arti *Hamemayu Hayuning Bawono* adalah membuat dunia menjadi *hayu* (indah) dan *rahayu* (selamat dan lestari). Konsep luhur ini merupakan salah satu nilai budaya Jawa yang masih melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta sampai sekarang (Yuwono Sri Suwito, 2005). Kandungan makna yang lebih dalam dari konsep tersebut adalah sikap dan perilaku manusia yang senantiasa mengutamakan harmoni, keselarasan, keserasian dan keseimbangan hubungan antara manusia dengan Tuhannya (*hablum minallah*), manusia dengan sesama manusia (*hablum minannas*) dan manusia dengan lingkungannya.

Muara dari sikap *Hamemayu Hayuning Bawono* ini adalah terwujudnya *negari panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi tata tentrem kerta raharja.* Makna dari ungkapan tersebut adalah *negari panjang punjung* (negara yang berdaulat, disegani dan namanya harum), *pasir wukir* (luas, memliki samudra dan gunung atau kekayaan alam yang besar), *gemah ripah loh jinawi* (ramai perniagaan dan banyak dikunjungi karena subu r serta terjangkau semua yang dibeli), *tata tenterem* (masyarakatnya tertata- taat hukum- dan tenteram) dan *kerta raharja* (masyarakatnya tekun bekerja dan aman dari kejahatan). Sebuah

gambaran negara yang penuh kebajikan dan dilindungi Tuhan, sehingga kehidupan masyarakatnya aman, tenteram, damai, sejahtera dan adil (*baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur)*.

Merti Code (merawat sungai Code) adalah salah satu manifestasi nilai-nilai budaya Jawa secara simbolis yang masih dilestarikan masyarakat. Dengan kata lain, Merti Code adalah salah satu manifestasi konsep *Hamemayu Hayunung Bawono* yang terkait dengan pelestarian lingkungan. Sebuah konsep yang menekankan pentingnya membangun harmoni atau keselarasan dengan alam. Merti Code adalah kegiatan budaya dari masyarakat yang dianggap kumuh, miskin dan tidak dapat mengelola lingkungan. Melalui tradisi ini, masyarakat sempadan sungai Code ingin membuktikan bahwa mereka memiliki potensi seni budaya dan potensi mengelola air sungai. Hal ini bermakna mereka mampu *memetri* atau merawat kebersihan sungai Code setiap hari.

FUNGSI DAN MAKNA SUNGAI DALAM TRADISI BUDAYA MERTI CODE

Sungai merupakan sumberdaya alam penting yang dapat menopang fungsi kehidupan semua mahluk hidup. Salah satu yang paling penting adalah ketersediaan air yang mampu menarik semua organisme untuk hidup tidak jauh darinya. Sejarah menunjukkan bahwa perkembangan manusia dan kebudayaan manusia tidak bisa dilepaskan dari keberadaan sungai. Sungai sangat berperan untuk transportasi, sumber bahan makanan baik untuk hewan atau tumbuhan sekitarnya. Sungai menjadi titik perkembangan peradaban suatu bangsa. Sebagaimana sungai yang lain, sungai Code juga memiliki peran dan fungsi penting bagi kehidupan manusia.

Code adalah sungai di bagian timur Kesultanan Yogyakarta yang digunakan untuk pertanian dan pengairan.Sungai Code adalah salah satu sungai penting bagi perkembangan kota Yogyakarta. Sungai ini membelah kota Yogyakarta sepanjang 42 km dan berhulu di gunung Merapi melalui tiga wilayah administratif (Sleman, Yogyakarta dan Bantul), melewati 6 kecamatan, 14 kelurahan, 66 Rukun Warga (RW), 17.000 Kepala Keluarga (KK), hilir sungai Code menuju Bantul (Laut Selatan). Pada era tahun 1960-1970 an, sungai Code memiliki fungsi penting sebagai sumberdaya air, material, fungsi ekonomi, ekologi, rekreasi dan sosial. Dengan kata lain, sungai Code menjadi sumber kemakmuran bagi warga sekitarnya. Aktifitas cuci, mandi, bercocok tanam, mencari ikan, berkumpul, bermusyawarah dan rekreasi dilakukan oleh warga secara bersama-sama di sungai Code. Pohon besar yang ada di sempadan sungai, tidak hanya menjadi peneduh, tetapi juga pembatas. Di bawah pohon tersebut terasa sejuk, rindang dan menjad tempat berkembang biaknya berbagai jenis

ikan. Sekitar pohon juga terdapat sumber mata air (belik) yang menjadi sumber mata air warga untuk memasak atau mandi. Dilandasi konsep *Hamemayu Hayuning Bawono*, warga menjaga harmoni dengan sungai. Warga senantiasa menjaga kebersihan sungai dengan tidak membuang kotoran apapun ke sungai dan tidak mengeksploitasi sungai.

Sebelum ada tradisi budaya Merti Code, masyarakat sempadan sungai Code sudah melakukan Ruwatan Bumi setiap 1 Syuro penanggalan Jawa. Ruwatan tersebut dalam bentuk tirakatan (kenduri) dengan menggelar pertunjukkan wayang kulit. Pada cara kenduri, selain acara makan bersama juga disediakan sesaji yang merupakan pengantar doa manusia kepada Sang Pencipta. Sesaji adalah satu bentuk materi yang digunakan sebagai sarana simbolis bersyukur kepada Sang Pencipta sekaligus permohonan keselamatan agar terhindar dari bencana. Di dalam sesaji terdapat perangkat lain seperti bunga, kemenyan, dan rokok kretek. Sesaji tersebut diletakkan di pinggir sungai Code dan dibiarkan beberapa hari. Tidak ada seorangpun yang berani mengambil atau merusak sesaji tersebut. Tujuan dari kegiatan Ruwatan Bumi adalah menghindari wabah penyakit dan bencana seperti banjir lahan dingin Merapi.

Akan tetapi kegiatan ruwatan tersebut berhenti akibat terjadinya peristiwa G 30 S PKI. Ada beberapa tokoh warga sempadan sungai Code yang ditangkap dengan alasan terlibat dalam gerakan tersebut. Tradisi Merti Code baru dimulai tahun 2001. Saat itu hanya ada dua kampung yang menyelenggarakan yaitu Jetisharjo dan Terban. Pada tahun 2003, pihak keraton Yogyakarta mengakui Merti Code sebagai kegiatan budaya yang hidup di masyarakat. Pengakuan tersebut ditandai dengan memberikan tombak Kyai Ranumurti yang berasal dari kesatuan prajurit Patang Puluhan. Tombak tersebut sebagai lambang "wakil" pihak keraton untuk silaturrahim dengan warga sekaligus restu atas penyelenggaraan tradisi Merti Code. Pada tahun 2003 ini, perayaan tradisi Merti Code meluas tidak hanya beberapa kelurahan di kota Yogyakarta, akan tetapi juga meliputi beberapa wilayah kabupaten Sleman yang dilewati sungai Code, yaitu padusunan Pogung,. Sendowo, Blunyah, Karangjati dan Gemawang. Perayaan tradisi Merti Code paling meriah terjadi pada tahun 2005. Perayaan tradisi tersebut berlangsung selama satu bulan dengan berbagai macam acara, yaitu pasar malam, membuat sungai Code menjadi arena memancing dan berbagai lomba di atas sungai Code. Perayaan Merti Code pada tahun 2006 berlangsung dalam suasana duka seiring dengan gempa tektonik yang melanda Daerah Istimewa Yogyakarta. Selanjutnya, perayaan tradisi Merti Code dilakukan setiap tahun.

Merti Code sebagai tradisi memetri atau merawat sungai, memiliki tiga fungsi, yaitu spiritual, sosial dan pelestarian lingkungan sungai (Suparwoko, 2010). Fungsi spiritual memberikan gambaran hubungan manusia dengan Tuhan (*hablum minnallah*). Upaya pelestarian sungai harus dilandasi kesadaran bahwa sungai diciptakan Tuhan untuk kepentingan manusia, sehingga harus senantiasa dijaga. Sementara itu fungsi sosial bermakna pelibatan individu-individu warga masyarakat yang memiliki kepentingan, kepercayaan dan keyakinan yang sama dalam tradisi tersebut (*hablum minannas*). Hal ini akan menumbuhkan kerukunan sosial sehingga menciptakan ketenangan, ketenteraman, dan kesejahteraan hidup bersama. Dibalik konsepsi keyakinan yang tertuang dalam tradisi merawat sungai ini terkandung kearifan lokal (*local wisdom*) yang memiliki fungsi sebagai mekanisme kontrol terhadap pengelolaan lingkungan sungai secara efektif. Inilah makna dari fungsi ketiga yaitu pelestarian lingkungan fisik atau alam.

AKSI PELESTARIAN SUNGAI DALAM TAHAPAN MERTI CODE

Prosesi acara dalam tradisi Merti Code meliputi Bersih Kampung, Tuk Pitu dan Kirab (Prasetyo, 2008). Tahap pertama dari prosesi acara Merti Code adalah Bersih Kampung. Bersih Kampung adalah kegiatan bersama masyarakat secara gotong royong untuk membersihkan rumah-pemukiman yang menjadi tempat tinggal mereka, daerah sempadan sungai Code, sungai Code itu sendiri dan sumber mata air. Bersih sungai berfungsi untuk menarik simpati sekaligus partisipasi warga masyarakat untuk membersihkan lingkungan sendiri, yaitu mulai dari rumah masing-masing warga, kemudian ke fasilitas umum yaitu daerah sempadan, sungai Code beserta sumber mata airnya. Tahapan pertama dari acara Merti Code ini memberi pemahaman agar setiap warga masyarakat memaknai kembali air sungai Code dalam kehidupan mereka. Bersih kampung merupakan tindakan langsung dari pemahaman yang benar tentang makna dan arti penting sungai untuk kehidupan dan kemakmuran warga selama ini. Aktifitas nyata dan langsung tersebut lebih mendekatkan kembali warga terhadap makna pelestarian dan pemeliharaan terhadap lingkungan.

Tahapan kedua dari upacara tradisi Merti Code adalah ritual pengambilan air di tujuh mata air (ritual Tuk Pitu). Pengambilan air di mata air juga dibarengi dengan membersihkan atau memperbaiki bak mata air dan lingkungan sekitarnya. Aktivitas selanjutnya adalah ruwatan sungai dan pertunjukkan wayang kulit. Sakralisasi terhadap sumber mata air tidak dimaksudkan untuk memberikan kesan mistis dan menciptakan ketakutan bagi warga, akan tetapi dimaksudkan agar warga lebih berhati-hati dan bersungguh-sungguh menjadi sumber

mata air. Jika sumber mata air tetap terjaga maka ketersediaan air bersih akan selalu ada. Ritual pengambilan air dimaksudkan untuk memberi penghormatan kepada air sebagai simbol meminta pertolongan dan perlindungan dari Tuhan Yang Maha Esa sekaligus membangun kesadaran bersama mengenai pentingnya menjaga kelestarian dan keberlangsungan sumber-sumber mata air. Sumber-sumber mata air telah memberi kehidupan bagi masyarakat, khususnya yang tinggal di sempadan sungai.

Adapun tahap ketiga adalah kirab dan rayahan. Kirab dan rayahan adalah kegiatan terakhir dalam acara tradisi Merti Code. Pasukan kirab membawa air dari tujuh sumber yang telah disucikan beserta gunungan boga untuk dibagikan kepada warga masyarakat. Pasukan kirab berasal dari masyarakat di daerah sempadan sungai dan berbagai kelompok kesenian yang ada di kota Yogyakarta. Adapun rayahan adalah simbol dari rasa syukur dengan memperebutkan air dan gunungan boga sebagai sumber kehidupan dan kemakmuran yang harus senantiasa dijaga kelestariannya.

Ketiga tahapan dan aksi pelestarian sungai dalam tradisi Merti Code dapat sederhanakan dalam bagan berikut ini :

Bagan 1.1 Tahapan dan Aksi Pelestarian Sungai Dalam Tradisi Merti Code

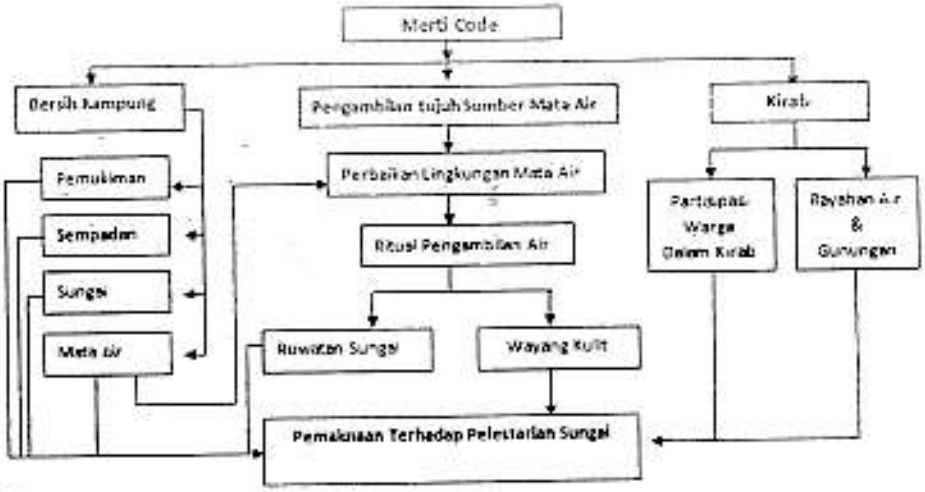

KESIMPULAN

Tradisi Merti Code merupakan salah satu manifestasi konsep *Hamemayu Hayuning Bawono*. Sebuah konsep luhur yang mementingkan harmoni antara alam (sungai) dan manusia. Sungai dimaknai sebagai sumberdaya yang harus dijaga kelestariannya dan tidak dieksploitasi. Harmoni antara sungai dan manusia akan membuat sungai menjadi sehat dan tidak rusak. Sungai yang sehat akan memberi manfaat besar kepada warga masyarakat sempadan sungai,

baik secara ekonomi, ekologi maupun sosial. Dengan demikian sungai akan memberi kemakmuran dan kesejahteraan bagi kehidupan manusia. Sebaliknya sungai yang tidak dijaga akan menjadi tidak sehat dan rusak. Kerusakan sungai akibat perilaku manusia akan membawa akibat buruk bagi manusia itu sendiri. Merti Code dengan ketiga tahapannya bertujuan untuk mengumpulkan banyak orang untuk menyelesaikan persoalan bersama melalui gotong royong. Konsep gotong royong dibangun kembali melalui berbagai kegiatan pelestarian lingkungan sungai. Ritual penghormatan terhadap air bermakna agar manusia menghargai air dan menjaga kelestariannya. Air bersih adalah sarana vital bagi kehidupan manusia. Merti Code sebagai politik pelestrian sungai berbasis kearifan lokal telah memberi inspirasi bagi mereka yang ingin melestarikan sungai secara berkelanjutan.

REFERENSI

Nugroho, Yuli Prasetyo ((2008). *Makna Sungai dan Praktek Pengelolaan Lingkungan Melalui Pendekatan Budaya*. Tesis. Universitas Indonesia. Jakarta

Purba, Jonny (2002) *Bunga Rampai Kearifan Lingkungan*. Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Jakarta

Rahmat, P.S. (2009). *Memupuk Institusi Lokal dan Modal Sosial dalam kehidupan Bermasyarakat*. Universitas Kuningan. Kuningan

Suseno, Franz Magnis. 2003. *Etika Jawa. Sebuah Analisa Falsafati Tentang Kebijaksanaan Hidup Orang Jawa*. Gramedia, Jakarta

Suhartini et.all. *Kearifan Lingkungan Masyarakat Dalam Mengelola Sumberdaya Alam dan Lingkungan Sungai Boyong Bagian Hulu dan Sungai Code. Makalah Seminar Nasional Pembangunan Berkelanjutan di Daerah Aliran Sungai Bengawan Solo : Membangun Sinergi antara Daya Dukung, Program Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat*. Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta. 19 Juni 2014

Sri Sultan Hamengku Buwono X (2009). *Pengelolaan Lingkungan Berbasis Budaya*. Bahan Kuliah Umum Program Pascasarjana Fakultas Geografi Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta. 23 November 2009

Setiawan, B. (2006). *Pembangunan Berkelanjutan dan Kearifan Lingkungan : Dari Ide ke Gerakan*. PPLH Regional Jawa. Kementerian Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Yogyakarta

Sri Suwito, Yuwono. *Pelestarian Warisan Budaya Jawa dan Lingkungan Hidup Untuk Mendukung Industri Pariwisata di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Simposium Lingkungan Hidup dan Pariwisata Dalam Rangka Memperingati 20 Tahun Kerjasama Provinsi DIY Dengan Kyoto-Perfecture. Jepang. Yogyakarta. 18-19 Juli 2005

Suparwoko. 2010. *Analisis Sumber Daya Sungai Code Sebagai Basis Wisata Alam di Kawasan Perkotaan Yogyakarta*. Research Gate Uiversitas Islam Indonesia.